Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Analisis Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota Palangka Raya Tentang Kebijakan Kementerian ESDM Yang Mengatur Pembelian Gas Dengan Antrean. Studi Kasus: Masyarakat Petuk Katimpun

Doni Dores [(1)*], Erina[(2)], Ayu Wulansari[(3)], Elia Damayanti[(4)], Saputra Adiwijaya[(5)], dan Muhammad Zusanri Batubara[(6)].
[(1, 2, 3, 4, 5, 6)] Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia
Email : [(1*)]donidores4420@gmail.com

A B S T R A K

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada bidang memasak. Gas LPG 3 kg yang diperuntukan bagi masyarakat golongan bawah, sehingga pemerintah memberikan subsidi terhadap penjualan LPG 3kg sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik metode kuantitatif yang mana peneliti langsung terjun ke masyarakat dengan bantuan kuesioner untuk melihat bagaimana dan seperti apa persepsi masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun terhadap kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM, untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut jadi, pembandingnya melihat dari segi ekonomi yaitu masyarakat golongan atas dan bawah. Secara garis besar, hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, bahwa masyarakat setuju dengan adanya kebijakan ini karena memudahkan mereka untuk mendapatkan LPG tanpa harus merasa takut tidak kebagian, serta dengan adanya kebijakan ini pendistribusian gas bersubsidi dapat terealisasi secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan, Gas LPG, Kelangkaan

A B S T R A C T

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg is one of the needs of the community in everyday life, especially in the field of cooking. 3 kg LPG gas is intended for lower-class people, so the government provides subsidies for the sale of 3 kg LPG as a form of government attention to the community. This study uses a quantitative method technique where researchers go directly to the community with the help of a questionnaire to see how and what the perception of the community in Petuk Katimpun Village is towards government policies, especially the Ministry of Energy and Mineral Resources, to see the public's perception of the policy so, the comparison looks at it from an economic perspective, namely the upper and lower classes. In general, the results obtained from the research conducted, that the community agrees with this policy because it makes it easier for them to get LPG without having to be afraid of not getting any, and with this policy the distribution of subsidized gas can be realized evenly and on target to the community.

Keywords: *Policy, LPG Gas, Scarcity*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
31.05.2025	04.06.2025	29.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memasak terutama masyarakat golongan bawah. Mengingat kehadiran LPG 3 kg yang memang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, maka pemerintah pun memberikan subsidi terhadap penjualan LPG 3 kg sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat (Karmilawati Dwi Rahayu et al. 2023). Dengan adanya subsidi yang diberikan negara, maka harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat sudah cukup murah dari harga aslinya. Selain memberikan keringanan berupa subsidi, pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg dengan membebaskan para pedagang kecil untuk mendistribusikan LPG 3 kg dengan cara dijual di tempat usaha mereka. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa LPG 3 kg dapat didistribusikan secara merata dan tepat sasaran, dibutuhkan juga pengawasan dari pihak pemerintah agar penyaluran tersebut dapat terealisasi dengan tepat (Parhesia et al., 2025).

Pada pelaksanaannya di lapangan, ternyata LPG 3 kg dijual oleh pedagang eceran dengan harga normal tanpa subsidi yang tentunya sangat memberatkan masyarakat (Ade Lia Novitasari et al. 2023). Hal tersebut tentunya langsung menjadi polemik di kalangan masyarakat yang selama ini tidak mengetahui bahwa pembelian atas LPG 3 kg telah disubsidi oleh negara melalui PT. Pertamina selaku pihak yang membidangi pendistribusian LPG yang dalam hal LPG 3 kg. Banyak masyarakat yang kaget karena ternyata harga LPG 3 kg yang mereka anggap normal selama ini merupakan harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan harga setelah subsidi. Selain itu, masyarakat juga melihat bahwa subsidi terhadap LPG 3 kg tidak tepat sasaran karena ada beberapa orang yang seharusnya mampu tetapi malah membeli LPG 3 kg yang sejatinya mendapat subsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Dengan melebarnya berita tentang penjualan LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan harga subsidi dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan bahwa LPG 3 kg tidak boleh lagi dijual eceran melainkan hanya boleh dijual oleh pangkalan yang sudah ada dan sub pangkalan yang rencananya akan dibuka kembali sehingga masyarakat harus mengikuti sistem antrean jika ingin membeli LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah guna memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh negara dapat tepat sasaran dan tidak ada lagi pihak yang menjual LPG 3 kg di luar harga yang telah ditetapkan. Biasanya harga LPG 3 kg dijual secara eceran dengan harga yang tinggi, serta jauh dari pangkalan karena terpengaruh tempat yang kurang strategis yang mengakibatkan harga eceran sangat beda jauh dengan harga yang aslinya (Safitri et al., 2024).

Petuk Katimpun merupakan salah satu kelurahan yang ada di pinggiran Kota Palangka Raya yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan tradisional. Selain sebagai nelayan, masyarakat setempat juga memiliki usaha berjualan (UMKM). Dengan kondisi masyarakat yang demikian, tentunya sangat bergantung terhadap subsidi dan ketersediaan LPG 3 kg. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelian LPG 3 kg di pangkalan dan sub pangkalan dengan sistem antrean, maka akan berpengaruh bagi masyarakat Petuk Katimpun baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan fenomena masalah tersebut, maka kami selaku tim peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tanggapan masyarakat terhadap realitas-realitas yang ada di masyarakat semenjak kebijakan tersebut diberlakukan. Ketertarikan kami untuk meneliti permasalahan tersebut, kami muat dalam judul **"Analisis Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Pembelian Gas 3 kg dengan antrean".** Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 April 2025. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementerian

ESDM tentang pembelian LPG 3 kg dengan antrean, mengetahui perbedaan persepsi antara masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan masyarakat golongan menengah ke atas tentang kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean, serta mengetahui realitas yang ada di masyarakat semenjak diberlakukannya kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dengan didukung oleh data kualitatif, sebagai data tambahan untuk menjelaskan secara mendalam tentang persepsi masyarakat tentang kebijakan Kementerian ESDM yang mengatur pembelian gas secara antrean di kalangan masyarakat Petuk Katimpun. Selain itu, analisis deskriptif juga penting dilakukan untuk memberikan interpretasi dan narasi yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh (Ul'zikri, 2024). Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan proses mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa angka. Metode ini pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering disebut pendekatan kuantitatif-empiris. Metode penelitian kuantitatif memiliki arah dan cara yang lebih jelas, sistematis, dan terstruktur dari pertama sampai akhir penelitian dilakukan, serta tidak dapat terpengaruh oleh keadaan yang ada pada lapangan (Priadana & Sunarsi, 2021). Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif dan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara observasi dan wawancara langsung ke lapangan dengan masyarakat (Harahap, 2020).

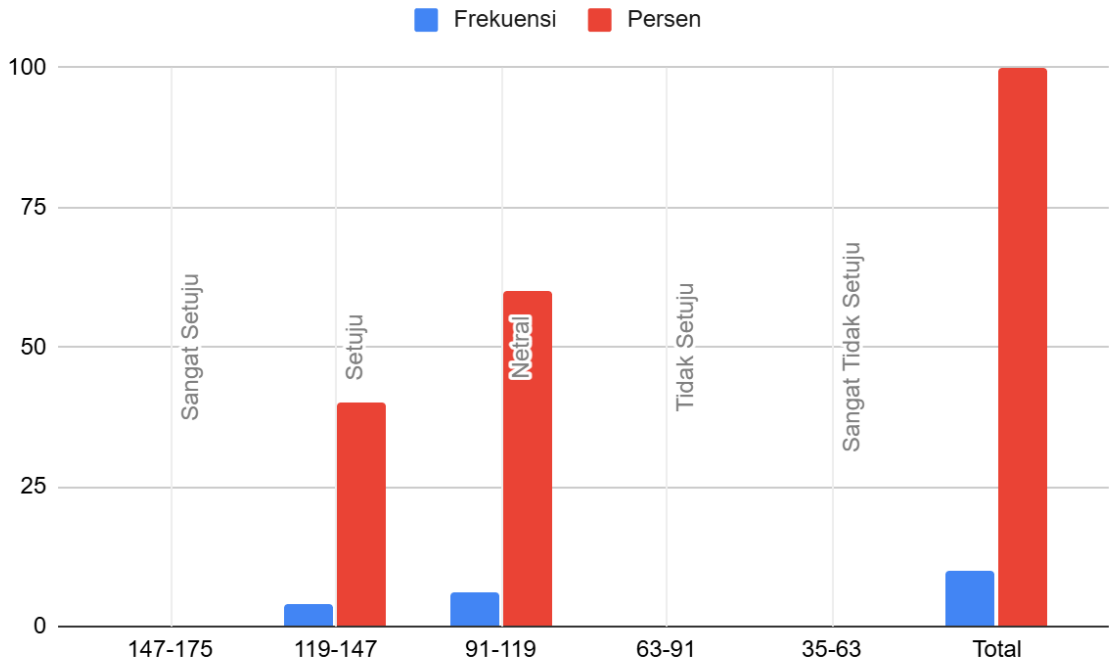
Proses penelitian yang kami lakukan yaitu wawancara langsung dengan masyarakat Petuk Katimpun untuk memperoleh data primer yang mendalam. Target populasi dan sampel pada penelitian ini adalah warga Kelurahan Petuk Katimpun yang menggunakan LPG 3kg dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling yaitu pengambilan sampel hanya untuk orang tertentu yang memiliki klasifikasi yang telah ditentukan oleh sang peneliti (Agustin et al. 2024). Kriteria purposive sampling pada penelitian kali ini terbagi menjadi dua, yaitu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat dari kalangan menengah ke atas. Penelitian ini menggunakan 20 orang sebagai sampel yang akan dikomparasikan dengan menganalisis persepsi dari kedua kriteria yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal tahun 2025 pemerintah terkhususnya Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan baru kepada masyarakat tentang pembelian gas LPG 3 kg (Gas Bersubsidi) yang hanya dilakukan di pangkalan resmi saja (Yang & Sasaran, 2025). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 tujuan kebijakan ini adalah supaya masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan Gas LPG secara merata dan tepat sasaran, serta tidak adanya penyalahgunaan distribusi gas secara berlebihan (Manik et al, 2025). Semakin sulitnya untuk mendapatkan Gas bersubsidi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli di eceran dengan harga tinggi, karena semakin langka gas bersubsidi maka semakin tinggi harga jual (Sianipar, 2023). Tetapi, nyatanya implementasi kebijakan tersebut mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun.

Kebijakan ini menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat golongan menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah yang memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut adalah data yang didapatkan dari penelitian di masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun.

Masyarakat Menengah Ke Atas



Gambar 1. Data Grafik Hasil Wawancara Masyarakat Menengah ke atas
Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Kelurahan Petuk Katimpun dengan purposive sampling yang melibatkan 10 orang dari kalangan menengah ke atas sebagai responden, maka didapatkan hasil yang disajikan dalam bentuk diagram di atas. Diagram tersebut menunjukkan data bahwa 40% orang setuju dengan kebijakan Kementerian ESDM tentang penjualan gas dengan antrean. Lalu, 60% sisanya memilih netral dalam merespon kebijakan tersebut. Persepsi masyarakat menengah ke atas dalam merespon kebijakan tersebut dominan netral karena tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan dan perekonomian mereka secara langsung. Sebagian masyarakat golongan menengah ke atas juga setuju dengan kebijakan pembelian tersebut karena menganggap kebijakan ini dapat membantu pendistribusian gas secara merata dan memotong mata rantai penjualan gas dengan harga nonsubsidi yang sejatinya memberatkan masyarakat.

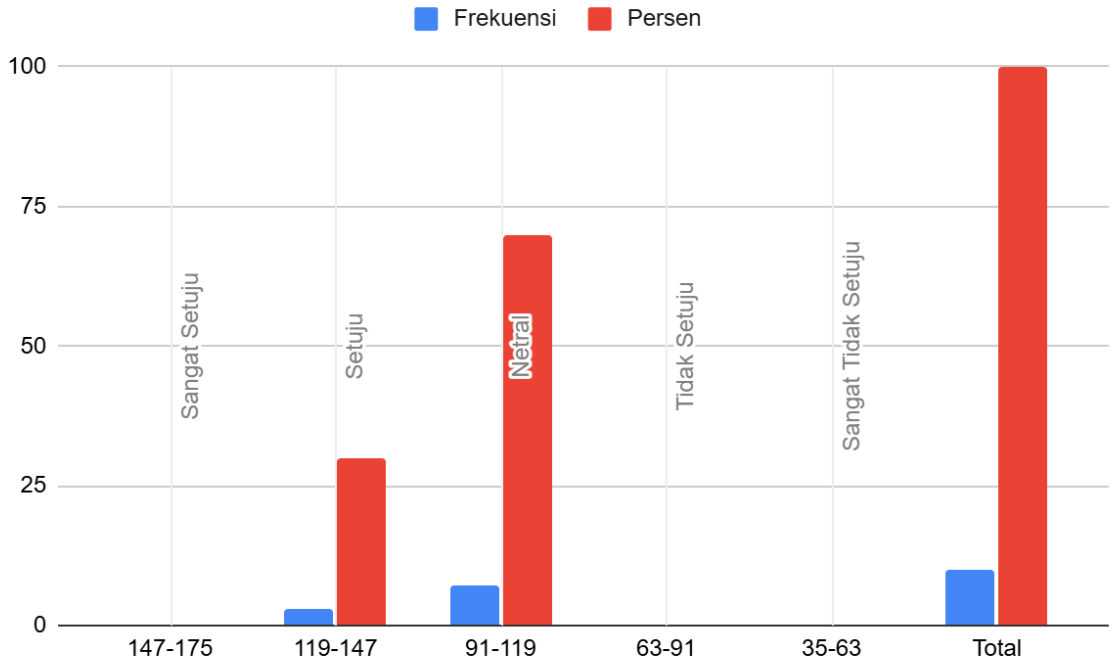
Hasil analisis berdasarkan data di atas yaitu masyarakat menengah ke atas tidak menolak hadirnya kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean melainkan sebagiannya justru setuju dengan kebijakan tersebut. Mengingat bahwa masyarakat kalangan menengah ke atas tidak bergantung pada subsidi LPG 3kg di pangkalan atau sub-pangkalan, maka kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Oleh sebab itulah, mayoritas dari mereka menjawab netral sebagai bentuk respon terhadap adanya kebijakan tersebut.

Responden dari 10 orang masyarakat menengah ke atas banyak memiliki netral karena berbagai alasan. Alasan masyarakat menengah ke atas banyak memilih netral karena menganggap kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap pekerjaan mereka, mereka juga menganggap bahwa pembelian gas di kedai atau warung jauh lebih mudah diakses dibandingkan harus membeli dengan harga lebih murah di pangkalan tetapi harus mengantri. Selain itu, masyarakat menengah ke atas juga memilih netral karena menganggap bahwa kebijakan ini sulit untuk terealisasi di daerah mereka karena kurangnya pangkalan ataupun sub-pangkalan dan

mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini tidak dapat mencegah penumpukan gas yang tidak adil karena di warung atau kedai LPG 3 kg masih dijual secara bebas.

Kemudian, 40% responden dari kalangan menengah ke atas ada yang memilih setuju karena menganggap bahwa kebijakan ini sangat membantu pihak-pihak yang layak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini dapat membantu masyarakat lebih teratur dalam pembelian gas karena dilakukan dengan sistem antrean. Lalu, masyarakat menengah ke atas juga memilih setuju karena kebijakan ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan gas yang selama ini mereka alami.

Masyarakat Menengah Ke Bawah



Gambar 2. Data Grafik Hasil Wawancara Masyarakat Menengah Ke Bawah
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan data diagram di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa hasil wawancara dengan 10 responden menengah ke bawah di Kelurahan Petuk Katimpun memuat 30% responden setuju dengan kebijakan tersebut dan 70% sisanya netral terhadap kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari respon masyarakat kalangan menengah ke atas pada data sebelumnya. Namun yang membedakan respon tersebut adalah analisis persepsinya. Masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak yang memilih netral karena lebih memilih membeli LPG 3kg secara instan di warung atau kedai setempat sehingga mereka menganggap bahwa kebijakan Kementerian ESDM tersebut tidak terlalu mempengaruhi perekonomian dan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun masih tidak memiliki pangkalan ataupun sub-pangkalan LPG sehingga masyarakat lebih memilih membeli dengan harga mahal di kedai atau warung dengan akses yang mudah tanpa harus antri di pangkalan atau sub-pangkalan wilayah lain.

Selain netral, masyarakat kalangan menengah ke bawah juga ada beberapa yang memilih setuju karena berharap dengan adanya kebijakan tersebut dapat meringankan belanja masyarakat terhadap LPG 3kg apabila subsidi dapat diakses secara merata. Lalu, masyarakat juga setuju

karena dengan adanya sistem antrean, mereka tidak perlu takut lagi akan kelangkaan gas karena dengan adanya sistem antrean di pangkalan atau sub-pangkalan, maka subsidi dapat tepat sasaran dan dapat memastikan pendistribusian LPG 3kg yang merata.

Data hasil wawancara dengan masyarakat menengah ke bawah di Kelurahan Petuk Katimpun tersebut didasari oleh macam-macam alasan. Responden yang memilih netral menganggap bahwa kebijakan ini terlalu rumit untuk diterapkan di wilayah mereka karena masyarakat secara umum lebih memilih untuk membeli LPG 3 kg di warung atau kedai dengan akses yang cepat dan mudah. Selain itu, responden juga berpendapat bahwa yang diinginkan masyarakat bukan hanya keringanan dari segi harga melainkan juga kemudahan dari segi akses pembelian. Lalu, responden juga memilih netral karena menganggap bahwa harga LPG 3 kg sulit untuk diturunkan meskipun sudah terkena subsidi dikarenakan alasan penjual yang mengatakan bahwa harga di Kalimantan masih berbeda dengan harga di Jawa. Alasan-alasan tersebutlah yang mendasari 70% responden menengah ke bawah memilih netral.

Kemudian untuk 30% sisanya memilih setuju karena menganggap bahwa kebijakan ini akan sangat membantu apabila dapat direalisasikan, terutama bagi mereka yang bidang usahanya berkaitan langsung dengan kebutuhan LPG, secara khusus LPG 3 kg. Keinginan mendapatkan harga yang lebih murah juga menjadi alasan responden memilih setuju terhadap kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean. Selain itu, responden juga menganggap bahwa kebijakan ini dapat mendistribusikan LPG 3 kg dengan subsidi secara merata dan lebih terarah kepada masyarakat yang memang layak untuk memperoleh subsidi. Sebagaimana dinyatakan oleh (Adhitya et al., 2024), Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi publik berkat kemajuan teknologi informasi, maka juga akan meningkatkan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih mudah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan Kementerian ESDM yang mengatur pembelian gas dengan antrean, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Helva Rahmi dkk (2020) dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo" yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum terealisasi atau dapat dikatakan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan dan penertiban dari pihak PT. Pertamina dengan pihak Pemerintah Daerah terhadap program operasional di tingkat Kabupaten. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang dimana dari hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih belum dapat berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif saja, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan didukung oleh data kualitatif, selain itu juga lokasi yang menjadi tempat penelitian pun berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Serta, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori sama sekali, sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan teori rational choice.

Penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul "Analisis Penyebab Kelangkaan Gas Elpiji 3KG Di kalangan Masyarakat Kabupaten Bengkalis" oleh Karmilawati, dkk (2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya dari penelitian ini adalah melihat penyebab terjadinya kelangkaan gas 3 Kg di pulau Bengkalis, karena terhambatnya akses keluar masuk kendaraan dari luar daerah menuju pulau Bengkalis yang hanya melalui penyeberangan roro, dengan banyak nya antrian kendaraan umum dan kendaraan angkutan BBM dan LPG, ini lah penyebab penghambat proses distribusi, yang artinya penyebab dalam kelangkaan pada pendistribusian akibat dari jalur transportasi yang kurang memadai serta antrian yang sangat panjang di penyebrangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilihat dari metode dan hasil yang ditemukan, namun penelitian terdahulu dengan sekarang masih saling berkaitan dengan satu sama lainnya.

Rational Choice Masyarakat Petuk Katimpun Tentang Kebijakan Pembelian Gas

Penelitian dianalisis menggunakan teori Rational Choice dari James S. Coleman. Rational Choice merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap keputusan diambil oleh individu adalah keputusan yang melalui proses berpikir dan diambil berdasarkan pilihan rasional individu itu sendiri (Y et al., 2025). Teori Rational Choice menyatakan bahwa apabila seseorang dihadapkan pada suatu pilihan, maka ia akan memilih suatu opsi yang paling masuk akal menurut pemikirannya. Teori Rational Choice yang dikemukakan oleh James S. Coleman tidak hanya menerima ide yang ada dan berfokus pada faktor internal sistem. Gagasan dasar dari pilihan rasional Coleman ialah sebuah tindakan yang terbentuk karena ketidaksengajaan yang memiliki sebuah tujuan, serta tujuan yang terbentuk dari nila-nilai ataupun pilihan-pilihan. Coleman menekankan pemikirannya yang membutuhkan tatanan yang aksi aktor memilih tindakan yang akan bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan, serta untuk memuaskan kebutuhan mereka (Putri, 2019).

Berdasarkan teori tersebut, maka data hasil penelitian pada jurnal ini dapat dianalisis menggunakan Teori Rational Choice karena masyarakat Petuk Katimpun selaku responden wawancara penelitian tentunya memilih berdasarkan pilihan rasional mereka masing-masing sehingga ditemukanlah data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram di atas. Responden memilih setuju ataupun netral atas dasar kalkulasi rasional yang mereka anggap paling masuk akal untuk dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Oleh sebab itulah, hasil dari penelitian ini cukup unik dan berbeda dari dugaan penulis sebelum dilakukannya penelitian ini. Teori Rational Choice merupakan teori yang sangat relevan untuk membongkar dan menganalisis persepsi masyarakat selaku responden dalam wawancara penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian di Kelurahan Petuk Katimpun tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur pembelian gas secara antrean, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menolak dengan adanya kebijakan pemerintah, karena masyarakat ke atas merasa ada atau tidak adanya kebijakan ini tidak berdampak atau berpengaruh bagi mereka. Sedangkan, masyarakat menengah ke bawah yang menjadi salah satu pengguna gas lpg 3 kg, menyatakan bahwa mereka secara umum memilih netral dapat dikatakan mereka setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Walaupun, mereka merasakan dampak secara langsung seperti sulitnya akses untuk mendapatkan gas bersubsidi dan antrean yang panjang, tapi sebagian dari mereka menyadarkan bahwa kebijakan tersebut juga sangat penting dalam pengendalian distribusi subsidi. Jadi, dengan adanya kebijakan ini diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pendistribusian gas bersubsidi secara merata dan tepat sasaran supaya akses masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan gas bersubsidi, kelangkaan yang dapat teratasi, serta mendapatkan harga yang terjangkau dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.

REFERENSI

Ade Lia Novitasari, Farah Laili Laksita Windy, and Friska Diah Mukaromah. 2023. "Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2(2): 52–59.

Adhitya, M. A., Pratama, P., Rafdi, H., & Patty, N. (2024). Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023). *Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial Terapan*, *3*(4), 40–49. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/11/11

Agustin, Kristina Yoni, and Dedi Kurnia Syah Putra. "Relevansi Teori Agenda Setting Pada Film Dokumenter Dirty Vote Terhadap Warga Bandung Menjelang Pilpres 2024." EProceedings of Management, vol. 11, no. 6, 2024.

Harahap, Nursapia. Penelitian Kualitatif. 2020.

Lestari, L. D., et al. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Ke-Langkaan Gas LPG Subsidi Di In-Donesia." Journal of Economics And Social Sciences (JESS), vol. 2, no. 2, 2023, pp. 112–21.

Manik, Karpolin Mentari, et al. "TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI ESDM No. 37. K/MG. 01/MEM. M/2023 TENTANG PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM BERSUBSIDI YANG TIDAK SESUAI ATURAN." *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 13, no. 2, 2025.

Novitasari, Ade Lia, et al. "Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang." JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 52–59.

Parhesia, K. P., Widanti, N. P. T., & Wiadnyani, I. A. P. S. (2025). PENGAWASAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG PADA SUB AGEN DI KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG. *Manajemen Strategis Terkini*, *7*(1).

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

Putri, Intan. PERSPEKTIF PILIHAN RASIONAL (LANSIA PEKERJA SEKTOR INFORMAL SEBAGAI TUKANG BECAK DI KOTA SURABAYA). Universitas Airlangga, 2019.

Rahayu, Karmilawati Dwi, et al. "Analysis Of The Causes Of The Scarcity Of 3 Kg LPG Gas Among The People Of Bengkalis Regency." HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences, vol. 2, no. 4, 2023, pp. 151–61.

Rahmi, Helva, et al. "Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Lpg 3kg Di Kecamatan Pasar Muara Bungo." Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA), vol. 4, no. 1, 2020.

Safitri, L. N., Dennis, T., & Yanti, R. T. (2024). ANALISIS PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GAS LPG 3 KG DI KOTA BENGKULU. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, *1*(3), 431–442.

Sianipar, R. (2023). Optimalisasi Ketahanan Energi Melalui Kebijakan Pengurangan

Konsumsi Gas Elpiji di Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *4*(1), 62–72.

Ul'zikri, A. R. (2024). *Mini Reserach Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal Melalui Kelas Online Menggunakan Pendekatan Model One-Group Pretest-Posttest Design Pada Mahasiswa Kabupaten Murung Raya*. *3*(4), 50–57. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/14/9

Y, A. M., Adnan, F., & Khaidir, A. (2025). *Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik*.

Yang, K., & Sasaran, T. (2025). *Komisi xii*. *XVII*(3), 1–5.